



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1959 tentang Perubahan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kebutuhan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Data dan Informasi (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1007);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lampiran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3).

MUHEKUNAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDAPATAN DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berikutnya.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berikutnya.
9. Pembayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.869.648.670.200,- (satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 345.419.827.300,- (tiga ratus empat puluh lima milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 184.469.561.000,- (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.817.494.800,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.086.047.900,- (dua belas milyar delapan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 132.046.723.662,- (seratus tiga puluh dua milyar empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.449.124.433.300,- (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Sisa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dinominasikan sebesar Rp1.809.648.000.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ratus rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dinominasikan sebesar Rp. 345.419.827.300,- (tiga ratus empat puluh lima milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinominasikan sebesar Rp. 184.669.501.000,- (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinominasikan sebesar Rp. 10.817.494.200,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinominasikan sebesar Rp. 12.086.047.900,- (dua belas milyar delapan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinominasikan sebesar Rp. 132.049.722.600,- (seratus tiga puluh dua milyar empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dinominasikan sebesar Rp. 1.449.134.433.300,- (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.319.382.861.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.741.572.300,- (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.104.409.600,- (tujuh puluh lima milyar seratus empat juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari atas :
 - c. Pendapatan hibah
 - d. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. –
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. –
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.104.409.600,- (tujuh puluh lima milyar seratus empat juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.932.811.373.400,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.359.860.425.024,- (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan sebesar Rp. 1.319.383.821.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan sebesar Rp. 129.741.272.300,- (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dicatatkan sebesar Rp. 79.104.409.600,- (tujuh puluh lima milyar seratus empat juta empat ratus sembilan puluh enam ratus rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Pendapatan hibah
 - b. Dana darurat dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan sebesar Rp. -
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan sebesar Rp. -
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan sebesar Rp. 79.104.409.600,- (tujuh puluh lima milyar seratus empat juta empat ratus sembilan puluh enam ratus rupiah).

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 dicatatkan sebesar Rp. 1.903.811.373.400,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dicatatkan sebesar Rp. 1.359.860.452.024,- (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 669.234.622.499,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 639.142.706.741,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. -
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. -
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.923.422.784,- (lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 559.673.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar 314.700.316.376,- (tiga ratus empat belas miliar tujuh ratus juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - g. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.362.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.296.602.820,- (lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.050.531.406,- (delapan puluh delapan miliar lima puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.647.979.700,- (seratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicencanakan sebesar Rp. 809.234.032.499,- (delapan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicencanakan sebesar Rp. 889.143.700.741,- (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicencanakan sebesar Rp. -
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicencanakan sebesar Rp. -
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dicencanakan sebesar Rp. 80.923.432.784,- (delapan puluh sembilan miliar dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dicencanakan sebesar Rp. 259.673.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dicencanakan sebesar Rp. 314.700.316.876,- (tiga ratus empat belas miliar tujuh ratus tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jembatan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - g. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicencanakan sebesar Rp. 10.302.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicencanakan sebesar Rp. 25.206.602.820,- (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicencanakan sebesar Rp. 88.050.331.406,- (delapan puluh delapan miliar lima puluh lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jembatan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicencanakan sebesar Rp. 100.647.979.700,- (seratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. -
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 53.202.450,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 253.250.632.000,- (dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.128.705.600,- (dua puluh milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 233.121.926.400,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 63.162.703.200,- (enam puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.177.703.200,- (tujuh puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. -
- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 53.202.450,- (lima puluh tiga dua ratus dua puluh empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 253.250.632.000,- (dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tiga dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.128.702.900,- (dua puluh milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 233.121.929.100,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 63.162.703.200,- (enam puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :

- a. Pembiayaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.177.703.200,- (tujuh puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ratus rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Pembiayaan pinjaman daerah;

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.177.703.200,- (tujuh puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. -
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. -
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. -
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. -
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. -

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.015.000.000,- (empat belas milyar lima belas juta rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. -
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.015.000.000,- (empat belas milyar lima belas juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. -
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. -
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. -

- (1) Penelitian kembali pembelanjaan daerah; dan
- (2) Penelitian pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih pertanggung jawaban anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan sebesar Rp. 77.177.703.200,- (tujuh puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tiga ratus tiga puluh dua ratus rupiah).
- (4) Penelitian dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan sebesar Rp. -
- (5) Hasil penelitian kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicairkan sebesar Rp. -
- (6) Penelitian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicairkan sebesar Rp. -
- (7) Penelitian kembali pembelanjaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dicairkan sebesar Rp. -
- (8) Penelitian pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dicairkan sebesar Rp. -

Paragraf 14

- (1) Pengeluaran pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dicairkan sebesar Rp. 14.015.000.000,- (empat belas milyar lima belas juta rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. Pembentukan dan cadangan;
 - b. Pevyrtan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pembelanjaan daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan sebesar Rp. -
- (3) Pevyrtan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan sebesar Rp. 14.015.000.000,- (empat belas milyar lima belas juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicairkan sebesar Rp. -
- (5) Pembelanjaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicairkan sebesar Rp. -
- (6) Pengeluaran pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dicairkan sebesar Rp. -

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 63.162.703.200,- (enam puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 63.162.703.200,- (enam puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 15

- (1) Selain untuk anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belajar daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 63.162.703.200,- (enam puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Pembayaan neto yang merupakan selisih penanaman pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dirincikan sebagai berikut: (enam puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Rincian Penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 3. Lampiran III Daftar nama pemerintah, instansi pemerintah, dan instansi tidak;
- 4. Lampiran IV Daftar nama pemerintah, instansi pemerintah, dan instansi bukan sosial;
- 5. Lampiran V Daftar nama pemerintah, instansi pemerintah, dan instansi bukan kerangka besifat umum dan besifat khusus;
- 6. Lampiran VI Daftar nama pemerintah, instansi pemerintah, dan instansi bukan hasil;
- 7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam\lampiran DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 10. Lampiran X Rincian besia keajaiban pemerintah provinsi\kabupaten\kota pada daerah kabupaten dalam rangka tentang APBD dan kabupaten tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas kabupaten Negara.

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 27

Pasal 17

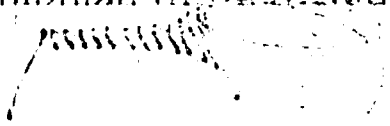
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditandatangani di Sampit
pada tanggal Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



FAHMINOR

Ditandatangani di Sampit
pada tanggal Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



FAHURUSALMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 27